

Pelatihan dan Pendampingan Inventarisasi Aset untuk Meningkatkan Tertib Administrasi Aset di Desa Pematang Johar

Inggrit Larasati Br. Panggabean¹, Audra Nailufar², Frenky Situmorang³, Novia Sari⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya

*Corresponding author

Email: inggrit@eka-prasetya.ac.id (Inggrit Larasati Br.Panggabean)*

Article History:

Received: August, 2026

Revised: August, 2026

Accepted: August, 2026

Abstract: *Pengelolaan aset desa yang tertib dan terdokumentasi dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam administrasi aset desa, seperti belum lengkapnya data inventaris, kurangnya dokumentasi aset, dan rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai prosedur inventarisasi aset. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Desa Pematang Johar dalam melakukan inventarisasi aset secara sistematis dan berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi observasi, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai inventarisasi aset serta tersusunnya database aset desa yang lebih terstruktur. Selain itu, aparatur desa mampu melakukan pencatatan aset menggunakan format inventaris yang sesuai dengan kebutuhan administrasi desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset desa secara berkelanjutan.*

Keywords:

Administrasi Aset; Aparatur Desa; Aset Desa; Inventarisasi Aset; Pendampingan

Pendahuluan

Pengadministrasian asset desa Adalah elemen krusial dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang jelas, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aset desa mencakup semua barang yang dimiliki oleh desa, yang berasal dari kekayaan asli desa, yang diakuisisi melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta yang diterima melalui hibah dan sumber resmi lainnya. Menurut Mardiasmo (2021), pengelolaan aset sektor publik merupakan bagian dari manajemen keuangan yang bertujuan mewujudkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan aset yang baik memerlukan sistem administrasi yang tertib agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan (Mardiasmo, 2021).

Ketentuan mengenai pengelolaan harta milik desa telah diatur dalam aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang membahas Pengelolaan Aset Desa. Aturan ini menekankan bahwa aset desa harus dikelola dengan tertib melalui langkah-langkah perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, keamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kegiatan inventarisasi merupakan salah satu elemen krusial dalam penatausahaan aset desa, berfungsi sebagai landasan untuk menyusun informasi tentang aset yang lengkap, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Inventarisasi aset merupakan proses pendataan, pencatatan, pengelompokan, dan pendokumentasian seluruh aset yang dimiliki organisasi secara sistematis. Menurut Siregar (2019), inventarisasi aset merupakan langkah awal dalam manajemen aset yang bertujuan menghasilkan informasi mengenai jenis, jumlah, kondisi, lokasi, nilai, dan status kepemilikan aset sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta optimalisasi pemanfaatan aset. Dengan inventarisasi yang baik, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas administrasi aset sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal.

Desa Pematang Johar Adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki beragam jenis aset seperti tanah, bangunan, kendaraan operasional, alat kantor, serta sarana dan prasarana desa. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa, terungkap bahwa pencatatan aset belum dilakukan dengan cara yang menyeluruh dan terorganisasi. Banyak aset yang belum tercatat dengan baik, sehingga menghambat proses pengawasan, pelaporan, dan penyusunan informasi mengenai aset desa. Situasi ini menunjukkan bahwa administrasi aset perlu ditata ulang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain itu, keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai prosedur inventarisasi aset menyebabkan administrasi aset belum berjalan secara optimal. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan merupakan strategi pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat maupun aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang tertib dan akuntabel.

Inventarisasi aset merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang efektif. Melalui inventarisasi yang baik, pemerintah desa dapat mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, dan status kepemilikan aset secara akurat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nailufar, A., Panggabean, I. L., Hakiki, D., Angkat, F. A., & Sari, (2024), yang menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah membutuhkan sistem inventarisasi yang terstruktur sehingga seluruh aset dapat teridentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal.

Pengelolaan aset yang baik juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Menurut Panggabean et al., (2026), kualitas pengendalian dan pengelolaan informasi yang baik mampu mendukung tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan. Dengan demikian, tersedianya data aset yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan yang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga meningkatkan kemampuan praktis aparatur desa dalam melakukan inventarisasi aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelatihan dan pendampingan dipilih sebagai metode pemberdayaan karena memungkinkan peserta memperoleh pengetahuan sekaligus pengalaman praktik secara langsung. Menurut Suharto (2021), pendampingan merupakan proses fasilitasi yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui transfer pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Metode

Metode untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menerapkan pendekatan partisipatif yang mengutamakan peran aktif dari aparatur Desa Pematang Johar di setiap fase kegiatan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019), pendekatan partisipatif bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam setiap tahapan kegiatan sehingga tercipta rasa memiliki dan keberlanjutan program. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung proses inventarisasi aset sesuai dengan kondisi riil di desa.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Menurut Sugiyono (2023), tahap persiapan merupakan langkah penting

dalam penelitian maupun kegiatan pemberdayaan karena menentukan kesiapan instrumen, sasaran, dan prosedur pelaksanaan. Pada tahap ini tim PkM melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Pematang Johar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Selanjutnya dilakukan observasi awal terhadap dokumen administrasi aset, kondisi pencatatan aset, serta penyusunan jadwal kegiatan. Tim juga menyiapkan modul pelatihan, format inventaris aset, lembar observasi, serta instrumen pre-test dan post-test sebagai alat evaluasi.

2. Tahap Observasi dan Identifikasi Permasalahan

Tim melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan aparatur desa untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengelolaan aset yang sedang berjalan. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi jenis aset yang dimiliki desa, sistem pencatatan yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam proses inventarisasi aset. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa observasi dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang efektif untuk memahami kondisi nyata suatu organisasi atau masyarakat sebelum suatu program dilaksanakan.

3. Tahap Pelatihan

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019), pelatihan merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus. Materi yang diberikan meliputi:

- a. konsep dasar pengelolaan dan inventarisasi aset desa;
- b. klasifikasi aset desa;
- c. prosedur pencatatan dan pendokumentasian aset;
- d. penyusunan kartu inventaris barang dan daftar inventaris aset;
- e. pentingnya administrasi aset dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

Selama pelatihan peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset di Desa Pematang Johar.

4. Tahap Pendampingan

Setelah pelatihan, tim melakukan pendampingan secara langsung kepada aparatur desa dalam melakukan inventarisasi aset. Menurut Suharto (2021), pendampingan merupakan proses fasilitasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menyelesaikan

permasalahan dan menjalankan kegiatan secara mandiri. Pendampingan dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi seluruh aset desa berdasarkan jenis dan lokasi;
- b. melakukan pencatatan data aset menggunakan format inventaris yang telah disiapkan;
- c. memverifikasi kelengkapan data aset;
- d. menyusun database inventaris aset desa secara sistematis.

Pada tahap ini tim PkM memberikan bimbingan teknis agar aparatur desa mampu melaksanakan inventarisasi aset secara mandiri setelah kegiatan selesai.

5. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Menurut Wibowo (2022), evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan hasil **pre-test** dan **post-test**;
- b. tingkat keterampilan peserta dalam mengisi format inventaris aset;
- c. kelengkapan data inventaris aset yang berhasil disusun;
- d. umpan balik peserta terhadap pelaksanaan kegiatan melalui lembar evaluasi.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Pematang Johar dalam meningkatkan tertib administrasi aset secara berkelanjutan.

Tabel 1. Indikator Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PkM

Indikator	Target Keberhasilan
Kehadiran peserta	≥ 90% dari aparatur desa yang diundang
Peningkatan pemahaman	Nilai rata-rata post-test meningkat minimal 20% dibandingkan pre-test
Kemampuan menyusun inventaris aset	Seluruh peserta mampu mengisi format inventaris aset dengan benar
Tersusunnya database aset	Tersedianya daftar inventaris aset desa yang lebih lengkap dan terstruktur
Kepuasan peserta	Minimal 80% peserta menyatakan kegiatan

Indikator	Target Keberhasilan
	bermanfaat

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, dengan melibatkan **30 orang pegawai desa** mencakup kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, staf administrasi desa, serta perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan aset. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pelatihan hingga pendampingan inventarisasi aset.

Identifikasi Permasalahan

Kegiatan diawali dengan observasi dan diskusi bersama aparat desa untuk mengidentifikasi kondisi administrasi aset yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa pencatatan aset desa masih dilakukan secara sederhana dan belum seluruh aset terdokumentasi menggunakan format inventaris yang baku. Beberapa aset juga belum memiliki informasi yang lengkap mengenai lokasi, kondisi, tahun perolehan, nilai aset, maupun status kepemilikannya. Kondisi tersebut menyebabkan proses monitoring, pelaporan, dan pengendalian aset belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan kegiatan pendampingan sehingga solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa Pematang Johar.

Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar pengelolaan aset desa, klasifikasi aset, prosedur inventarisasi, teknik pencatatan aset, serta penyusunan administrasi inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama kegiatan berlangsung, **30 peserta** mengikuti pelatihan secara aktif. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan pengelompokan aset desa, mekanisme pencatatan aset yang diperoleh melalui hibah, serta penyusunan dokumen inventaris yang sesuai dengan kebutuhan administrasi desa.

Pendampingan Inventarisasi Aset

Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan secara langsung dalam melakukan inventarisasi aset desa. Tim PkM mendampingi aparat desa dalam mengidentifikasi aset berdasarkan jenis, lokasi, kondisi, tahun perolehan, serta kelengkapan dokumen kepemilikan. Data tersebut kemudian dicatat

menggunakan format inventaris aset yang telah disiapkan.

Melalui kegiatan pendampingan, aparaturnya desa memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan inventarisasi aset secara sistematis. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan database inventaris aset yang lebih lengkap sehingga memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pemantauan, pemeliharaan, dan penyusunan laporan aset pada periode berikutnya.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui **pre-test** dan **post-test** yang diberikan kepada seluruh **30 peserta**, serta observasi terhadap kemampuan peserta dalam mengisi format inventaris aset.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Nilai rata-rata **pre-test** sebesar **62,4** meningkat menjadi **87,1** pada **post-test**, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar **39,6%**. Selain peningkatan pengetahuan, peserta juga mampu menyusun format inventaris aset secara lebih sistematis dan lengkap dibandingkan sebelum pelaksanaan kegiatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode pelatihan yang dikombinasikan dengan pendampingan praktik secara langsung efektif dalam meningkatkan kompetensi aparaturnya desa dalam pengelolaan aset. Hasil ini sejalan dengan pendapat Nailufar, A., Panggabean, I. L., Hakiki, D., Angkat, F. A., & Sari, (2024) yang menyatakan bahwa inventarisasi aset yang dilakukan secara sistematis mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset pemerintah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tata kelola organisasi yang akuntabel sebagaimana dikemukakan oleh Panggabean et al., (2026).

Hasil kegiatan ini sejalan dengan Dinata & Suwardi, (2025) yang menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan aparaturnya desa mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan aset serta mendorong terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan akuntabel melalui inventarisasi aset yang lebih tertib. Temuan ini juga mendukung Izzalqurny et al., (2023) yang menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan inventarisasi aset mampu membantu pemerintah desa dalam menyusun pencatatan aset secara sistematis sehingga proses pelaporan dan pengelolaan aset menjadi lebih efektif.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparaturnya Desa Pematang Johar dalam melakukan inventarisasi aset. Hasil nyata dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen inventaris aset yang lebih terstruktur, meningkatnya kemampuan aparaturnya desa dalam melakukan pencatatan aset secara mandiri, serta tersedianya database aset desa yang dapat digunakan

sebagai dasar dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset secara berkelanjutan.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Jumlah peserta	-	30 orang
Rata-rata nilai pre-test	62,4	-
Rata-rata nilai post-test	-	87,1
Peningkatan pemahaman	-	39,6%
Kemampuan mengisi format inventaris	Masih terbatas	Mampu menyusun inventaris aset secara mandiri
Database aset	Belum lengkap	Tersusun lebih sistematis dan terdokumentasi

Tabel 3. Luaran Kegiatan Pengabdian

Tahapan	Luaran yang Dihasilkan
Observasi	Identifikasi permasalahan administrasi aset desa
Pelatihan	Peningkatan pengetahuan aparatur mengenai inventarisasi aset
Pendampingan	Penyusunan format inventaris dan pendataan aset desa
Evaluasi	Peningkatan kompetensi aparatur desa berdasarkan hasil pre-test dan post-test
Akhir kegiatan	Database inventaris aset desa yang lebih lengkap dan terstruktur

Diskusi

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan inventarisasi aset di Desa Pematang Johar menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang dipadukan dengan praktik langsung mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola administrasi aset. Keterlibatan peserta secara aktif selama proses pelatihan dan pendampingan memberikan kesempatan bagi aparatur desa untuk memahami setiap tahapan inventarisasi aset sekaligus menerapkannya pada aset yang dimiliki desa. Pendekatan ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual karena peserta mempraktikkan materi menggunakan data aset yang mereka kelola sehari-hari.

Peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan melalui hasil evaluasi mengindikasikan bahwa pelatihan telah berhasil meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset desa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian

besar aparaturnya desa masih mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan aset, melengkapi informasi administrasi, serta menyusun dokumen inventaris secara sistematis. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, peserta mampu melakukan identifikasi, klasifikasi, serta pencatatan aset menggunakan format inventaris yang lebih terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan yang disertai praktik langsung lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata.

Selain meningkatkan kompetensi aparaturnya desa, kegiatan ini juga menghasilkan dokumen inventaris aset yang lebih lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Ketersediaan database aset yang sistematis menjadi salah satu langkah awal dalam mewujudkan tata kelola aset desa yang akuntabel. Informasi aset yang lengkap akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban aset. Dengan demikian, inventarisasi aset tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal dalam pengelolaan aset desa.

Temuan ini sejalan dengan Nailufar, A., Panggabean, I. L., Hakiki, D., Angkat, F. A., & Sari, (2024) yang menyatakan bahwa inventarisasi aset yang dilakukan secara sistematis dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset serta mendukung optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah. Inventarisasi yang baik memungkinkan setiap aset memiliki identitas yang jelas sehingga risiko kehilangan, duplikasi pencatatan, maupun penyalahgunaan aset dapat diminimalkan. Selain itu, pengelolaan aset yang tertib akan menghasilkan informasi yang lebih akurat sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh Jannah, (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi pengelolaan aset desa mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat penyusunan laporan, dan memudahkan penelusuran aset dibandingkan pencatatan secara manual.

Hasil kegiatan juga mendukung pandangan Panggabean et al., (2026) bahwa peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan pengendalian internal merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan desa, administrasi aset yang tertib akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Keberhasilan kegiatan ini juga dipengaruhi oleh tingginya partisipasi **30 orang aparaturnya desa** selama seluruh rangkaian kegiatan. Antusiasme peserta dalam sesi diskusi, praktik, dan pendampingan menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap

peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset desa. Keterlibatan langsung aparatur desa dalam proses inventarisasi memberikan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap sistem administrasi aset yang disusun sehingga peluang keberlanjutan penerapan hasil kegiatan menjadi lebih besar.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pendampingan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga belum seluruh aset desa dapat diverifikasi secara mendalam, terutama aset yang memiliki dokumen kepemilikan belum lengkap atau memerlukan penelusuran historis. Selain itu, inventarisasi masih dilakukan menggunakan format administrasi sederhana sehingga pengelolaan data belum terintegrasi dengan sistem informasi berbasis digital.

Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan secara berkala serta pengembangan sistem inventaris aset berbasis digital yang mampu menyimpan, memperbarui, dan menyajikan informasi aset secara lebih efektif. Digitalisasi administrasi aset diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset desa sekaligus mendukung implementasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Aktivitas Pengabdian kepada komunitas melalui kursus dan bimbingan inventarisasi aset di Desa Pematang Johar telah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi aparatur desa dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi aset. Kegiatan yang diikuti oleh **30 orang aparatur desa** berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep pengelolaan aset, klasifikasi aset, serta prosedur inventarisasi yang sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintahan desa. Selain peningkatan pengetahuan, peserta juga memperoleh keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mencatat aset menggunakan format inventaris yang lebih sistematis.

Pendampingan yang dilakukan menghasilkan dokumen inventaris aset dan database aset desa yang lebih terstruktur sehingga mendukung proses pengawasan, pemeliharaan, serta pelaporan aset secara lebih efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggabungkan metode pelatihan dengan pendampingan merupakan cara yang berhasil dalam meningkatkan keteraturan dalam administrasi aset desa serta menguatkan tanggung jawab dalam pengelolaan aset.

Keberlanjutan hasil kegiatan memerlukan komitmen pemerintah desa untuk melakukan pembaruan data aset secara berkala serta mengembangkan sistem administrasi aset yang terintegrasi, sehingga inventarisasi aset dapat menjadi bagian

dari tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan pendampingan lanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset desa perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pengelolaan aset pada masa mendatang.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pematang Johar, yang berada di Kabupaten Deli Serdang, atas izin, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan selama pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat. Ucapan apresiasi juga ditujukan kepada semua pegawai Desa pematang Johar yang telah berkontribusi secara aktif dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, penyelenggaraan pelatihan, hingga pendampingan inventarisasi aset.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya melalui (LPPM) atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Penulis juga mengapresiasi seluruh anggota tim Pengabdian kepada Masyarakat yang turut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta penyusunan luaran kegiatan.

Harapan kami, hasil dari kegiatan ini dapat memberikan keuntungan bagi Pemerintah Desa Pematang Johar dalam menciptakan pengelolaan aset desa yang lebih tertib, jelas, dan bertanggung jawab, serta menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian yang sejenis di masa mendatang.

Daftar Referensi

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dinata, M. R. K., & Suwardi. (2025). ' Asabiyah : Jurnal Pengabdian Hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum Journal*.
- Izzalqurny, T. R., Hamim, A. R., Pebriyanti, F., & Abdillah, S. A. (2023). 51933-75676707316-1-Pb. 6, 110–116.
- Jannah, M. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Uwie Berbasis Web. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Sistem Informasi*.
- Nailufar, A., Panggabean, I. L., Hakiki, D., Angkat, F. A., & Sari, E. N. (2024). Audra Nailufar, Inggrit Larasati Br.Panggabean, Dewi Hakiki, Fhatiya Alzahra Angkat, Eka Nurmala Sari. In *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 2(1), 375–383.

- Panggabean, L. B., Astuty, W., & Olivia, H. (2026). *Fraud Risk Assessment , Audit Experience , And Audit Quality : The Moderating Role of Professional Skepticism*. 13(1), 9–20.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Siregar, D. D. (2019). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 3). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo. (2022). *Manajemen Kinerja* (Edisi 6). Depok: Rajawali Pers.